

ESTIMASI KEBUTUHAN BIAYA INVESTASI UNTUK PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN ANTARNEGARA

Alkadri

Peneliti Madya Bidang Perekonomian Kota dan Regional di Pusat PKPDS – BPPT Jakarta

Abstract

The development of many aspects in most regencies/municipalities in cross-border area is left behind, compare with the development archieve in other regions in Indonesia. Indeed, cross-border area have an important role as a front gate (main entrance) of Indonesia. This phenomenon happened because of the limitted budget for cross-border area development. This budget allocation is smaller than the actually budget needed for increasing the cross-border area development. Using economic growth approach and fiscal capacities approach of every region, this paper estimates the investment needed for development in eight region of cross border areas during 2006-2009.

Kata Kunci : Estimasi Kebutuhan Investasi, Kawasan Perbatasan Antarnegara

1. PENDAHULUAN

Tidak dapat dipungkiri lagi, bahwa pembangunan nasional di berbagai bidang selama ini telah menghasilkan tingkat kemajuan yang berbeda-beda di antara berbagai daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik di bidang infrastruktur (transportasi, energi, telekomunikasi, informasi, fasilitas sanitasi, infrastruktur ekonomi, infrastruktur lainnya), perekonomian (sektor-sektor produksi), sumberdaya manusia (terutama pendidikan dan kesehatan), sosial, maupun politik dan ideologi. Berbagai pendekatan dan kebijakan memang telah ditempuh oleh serangkaian pemerintahan yang berkuasa, akan tetapi kesenjangan tingkat kemajuan pembangunan itu tetap saja mengemuka dalam wacana pembangunan nasional hingga sekarang ini.

Salah satu kategori daerah yang tingkat kemajuan pembangunannya relatif lamban atau tertinggal adalah daerah-daerah yang secara geografis terletak di kawasan perbatasan antarnegara, baik perbatasan darat maupun perbatasan laut. Pada tahun 2005, paling tidak ada 200-an kecamatan di sekitar 47 kabupaten/kota di 12 provinsi di Indonesia yang posisinya berada di kawasan perbatasan darat dan/atau laut dengan dua belas negara tetangga (Sekretariat Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional, Direktorat Jenderal Penataan Ruang, Departemen Pekerjaan Umum, 2005; Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2005; Alkadri, 2005; Jusnadi dkk., 2005;

Pemerintah Kabupaten Raja Empat, 2004; Dewi dkk., 2005:15-31).

Sementara itu, di dalam Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar, ada 92 buah pulau-pulau kecil terluar yang tersebar mulai dari wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, Maluku, hingga Papua. Dari 92 pulau kecil terluar tersebut, sebanyak 77 pulau terletak di sembilan provinsi yang secara geografis terletak di kawasan perbatasan antarnegara. Kemudian, ada 13 pulau di antaranya yang diprioritaskan pengembangannya (Jusnadi dkk., 2005; Dewi dkk., 2005:15-31).

Ke-13 pulau tersebut adalah Pulau Rondo (Kota Sabang, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, berbatasan dengan India), Pulau Berhala (Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, dengan Malaysia), Pulau Nipah (Kota Batam, Kepulauan Riau, Singapura), Pulau Sekatung (Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, Vietnam), Kepulauan Anambas (Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, Malaysia), Pulau Sebatik (Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur, Malaysia), Pulau Marore (Kabupaten Kepulauan Sangehe, Sulawesi Utara, Philipina), Pulau Miangas (Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, Philipina), Pulau Fani (Kabupaten Raja Ampat, Irian Jaya Barat, Palau/Philipina), Pulau Fanildo (Kabupaten Biak Numfor, Irian Jaya Barat, Palau), Pulau Asubutun (Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Maluku, Australia), Pulau Wetar (Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Maluku,

Australia), dan Pulau Batek (Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, Timor Leste).

Lambannya tingkat kemajuan pembangunan di daerah-daerah perbatasan antarnegara yang diwariskan oleh pemerintahan sebelumnya, mulai dari era Soeharto, B. J. Habibie, Abdurrahman Wahid, sampai Megawati Soekarnoputri, telah mendorong pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono untuk menuntaskan segera ketertinggalan pembangunan yang dialami oleh daerah-daerah di kawasan perbatasan antarnegara tersebut. Berbagai langkah di berbagai bidang pembangunan telah ditempuh pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, baik dalam bentuk kebijakan maupun tindakan implementatif.

Dari sudut pandang politis, pemerintah telah membentuk sebuah kementerian, yaitu Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, yang antara lain bertugas mengentaskan ketertinggalan pembangunan di kawasan perbatasan antarnegara. Di samping itu, pemerintah terus berupaya mengoptimalkan peran daerah dalam membangun wilayahnya sendiri melalui penyempurnaan kebijakan otonomi daerah, termasuk dalam bentuk pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung.

Dari sisi pandang ekonomi, pemerintah juga telah membulatkan komitmennya untuk segera mempercepat pembangunan infrastruktur, kawasan, sektor-sektor produksi, maupun pembangunan nonfisik di seluruh kawasan perbatasan antarnegara di Indonesia. Akan tetapi, kebulatan tekad ini masih dihadapkan kepada berbagai bentuk kendala, dimana salah satu di antaranya adalah minimnya anggaran yang dimiliki untuk membiayai pembangunan kawasan perbatasan.

Memang tidak bisa dielakkan, bahwa krisis ekonomi yang berkepanjangan sejak tahun 1997 telah membuat kemampuan keuangan pemerintah – juga swasta dan masyarakat – menjadi sangat lemah. Keadaan ini tentu saja bisa membuyarkan komitmen pemerintah mempercepat pembangunan kawasan perbatasan antarnegara, jika tidak dicarikan segera solusinya. Padahal – di sisi lain – serangkaian program dan kegiatan pembangunan kawasan perbatasan antarnegara telah disusun secara antusias oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sejak beberapa tahun yang lalu (Jusnadi dkk., 2005; Dewi dkk., 2005:15-31; Hamid dkk., 2001; Alkadri dan Hamid, 2003; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, 2005).

Tulisan ini berupaya mengestimasi seberapa besar biaya investasi yang dibutuhkan untuk mendanai pembangunan kawasan perbatasan

antarnegara, sesuai dengan proyeksi tingkat pertumbuhan ekonomi dan kapasitas fiskalnya. Ada delapan provinsi di kawasan perbatasan antarnegara yang akan dikaji dalam tulisan ini, yakni Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua.

Di samping mengestimasi kebutuhan investasi, pada bagian akhir dari tulisan ini juga akan dikemukakan sumber-sumber pembiayaan yang bisa digunakan untuk pembangunan kawasan perbatasan antarnegara.

2. BAHAN DAN METODE

2.1. Metode Perhitungan Kebutuhan Investasi

Untuk mempercepat pembangunan kawasan perbatasan antarnegara, salah satu langkah yang bisa ditempuh adalah dengan mendorong kegiatan investasi di sepanjang kawasan perbatasan antarnegara tadi. Investasi tersebut tidak hanya untuk sektor-sektor produksi, melainkan juga untuk infrastruktur kawasan dan investasi nonfisik. Karena itu, dibutuhkan biaya investasi yang tidak sedikit jumlahnya.

Seberapa besar biaya investasi yang dibutuhkan untuk membangun kawasan perbatasan antarnegara, digunakan metode proyeksi yang didasarkan pada model pertumbuhan Harrod-Domar berikut (Alkadri, 2003:278) :

$$g = \frac{i}{k} \quad (1)$$

dimana :

g = persentase tingkat pertumbuhan ekonomi yang ingin dicapai

i = persentase besarnya investasi yang dibutuhkan

k = perkiraan ICOR (*incremental capital output ratio*)

Untuk menghitung besarnya investasi yang dibutuhkan berdasarkan formulasi di atas, ada beberapa asumsi yang diajukan, yakni :

1. Persentase tingkat pertumbuhan ekonomi yang ingin dicapai didasarkan pada dua skenario, yakni :
 - a. Skenario 1 (Skenario Normal), yaitu proyeksi tingkat pertumbuhan ekonomi rata-rata selama periode 2006-2009 yang didasarkan pada tingkat pertumbuhan

ekonomi rata-rata setiap daerah kajian sepanjang kurun waktu 2001-2003.

- b. Skenario 2 (Skenario Akselerasi), yaitu proyeksi tingkat pertumbuhan ekonomi rata-rata untuk rentang waktu 2006-2009 yang didasarkan pada tingkat pertumbuhan ekonomi rata-rata selama jangka waktu 2001-2003 yang dipercepat beberapa kali lipat sesuai dengan kapasitas fiskal yang dimiliki setiap daerah kajian pada tahun 2003.

2. *Incremental capital output ratio* (ICOR) diperkirakan berkisar 4,0-5,0 setiap tahunnya, disesuaikan dengan kapasitas fiskal dan berbagai keterbatasan yang dimiliki setiap daerah di kawasan perbatasan antarnegara, baik dalam hal prasarana dan sarana (infrastruktur), kemampuan manajemen pembangunan, kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia, maupun teknologi.

2.2. Metode Perhitungan Kapasitas Fiskal

Kapasitas fiskal merupakan sebuah parameter yang menggambarkan kemampuan keuangan suatu daerah provinsi/kabupaten/kota dalam membiayai pembangunannya. Kapasitas fiskal ini dicerminkan melalui penerimaan umum APBD (tidak termasuk dana alokasi khusus, dana darurat, dana pinjaman lama, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu, tidak termasuk untuk belanja pegawai).

Perhitungan kapasitas fiskal setiap daerah didasarkan pada formula berikut (Keputusan Menteri Keuangan No. 538/KMK.07/2003) :

$$KF = \frac{(PAD + BH + DAU + PL) - BP}{\text{Jumlah Penduduk Miskin}} \quad (2)$$

dimana :

- KF = kapasitas fiskal
- PAD = pendapatan asli daerah
- BH = bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak (sumberdaya alam)
- DAU = dana alokasi umum
- PL = Penerimaan lain-lain yang sah, kecuali dana alokasi khusus, dana darurat, dana pinjaman lama, dan penerimaan lainnya yang dibatasi penggunaannya.
- BP = belanja pegawai.

Merujuk pada metode perhitungan di atas, maka kapasitas fiskal dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu :

- a. Daerah yang termasuk dalam kelompok (*decile*) 1 dan 2 merupakan daerah yang mempunyai kategori kapasitas fiskal tinggi.
- b. Daerah yang termasuk dalam kelompok (*decile*) 3, 4, dan 5 merupakan daerah yang mempunyai kategori kapasitas fiskal sedang.
- c. Daerah yang termasuk dalam kelompok (*decile*) 6, 7, 8, 9, dan 10 merupakan daerah yang mempunyai kategori kapasitas fiskal rendah.

2.3. Metode Perhitungan Tingkat Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) adalah suatu proses kenaikan output dalam jangka panjang. Penekanan pada "proses" disebabkan pembangunan mengandung unsur dinamis, perubahan, atau perkembangan. Karena itu, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan salah satu syarat utama bagi kelangsungan pembangunan ekonomi di suatu negara/daerah.

Secara teori, pertumbuhan ekonomi bisa bersumber dari sisi penawaran agregat (*aggregate supply*) maupun sisi permintaan agregat (*aggregate demand*). Dari sisi penawaran agregat, pada mulanya aliran klasik menganggap bahwa besarnya pertumbuhan ekonomi hanya dipengaruhi oleh dua faktor, yakni kapital dan tenaga kerja, sedangkan kemajuan teknologi (*technology progress*) diasumsikan konstan (*given*). Hal ini dapat dilihat dengan jelas dari fungsi produksi Cobb-Douglas berikut (Irwani, 1997:19-38) :

$$Q_t = T_t K_t^\alpha L_t^\beta \quad (3)$$

dimana :

Q_t = tingkat produksi pada periode t

T_t = tingkat teknologi pada periode t

K_t = jumlah kapital pada periode t

L_t = jumlah tenaga kerja pada periode t

α, β = produktivitas kapital dan tenaga kerja

Pada perkembangan selanjutnya, fungsi produksi di atas berkembang menjadi :

$$Q = f(K, L, M, E) \quad (4)$$

dimana M adalah input antara dan E merupakan energi, dan kemudian berkembang lagi seperti berikut :

$$Q = f(K, L, M, E, T) \quad (5)$$

dimana T adalah teknologi

Perkembangan fungsi produksi dari persamaan (3) menjadi (4) dan (5) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di suatu negara/daerah tidak lagi hanya dipengaruhi oleh faktor kapital dan tenaga kerja. Beberapa faktor lainnya seperti input antara, energi, dan teknologi juga telah menjadi faktor penentu dalam pembentukan output (Lucas Jr., 1988; Romer, 1990:71-102; Rosenberg, 1972).

Sementara itu, dari sisi permintaan agregat, pertumbuhan ekonomi bersumber dari empat komponen pembentuk pendapatan nasional (Y), yaitu konsumsi masyarakat (C), pembentukan modal atau investasi (I), pengeluaran pemerintah (G), dan ekspor neto (ekspor dikurangkan dengan impor, $X-M$), atau secara matematis dapat ditulis sebagai berikut (Trihadiwati, 2000:32) :

$$Y = C + I + G + (X-M) \quad (6)$$

Perubahan pendapatan nasional dari satu periode (tahun) ke periode (tahun) berikutnya akan menggambarkan besarnya pertumbuhan ekonomi suatu negara/wilayah. Pertumbuhan ekonomi tersebut biasanya disajikan dalam bentuk perubahan produk domestik bruto (PDB) suatu negara atau produk domestik regional bruto (PDRB) sebuah daerah.

Selanjutnya, untuk menghitung seberapa besar pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota di delapan provinsi yang termasuk kawasan perbatasan negara, dapat dipergunakan indikator PDRB. Formulasi tingkat pertumbuhan ekonomi yang dipakai dalam tulisan ini adalah sebagai berikut (Widodo, 1990) :

$$\Delta PDRB_t = \frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \times 100\% \quad (7)$$

dimana :

$\Delta PDRB$ = tingkat pertumbuhan ekonomi

$PDRB$ = produk domestik regional bruto

t = tahun t

$t-1$ = satu tahun sebelumnya

Dalam tulisan ini, tingkat pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di delapan provinsi di kawasan perbatasan antarnegara periode 2001-2003 dihitung berdasarkan perkembangan PDRB menurut harga konstan 1993. Hasil perhitungan selama periode ini akan dirata-ratakan, dan kemudian digunakan sebagai dasar untuk proyeksi

tingkat pertumbuhan ekonomi, baik skenario normal maupun skenario akselerasi, dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal masing-masing daerah kajian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Konsep Pembiayaan Pembangunan oleh Pemerintah

Dalam rangka membiayai pembangunan nasional dan daerah untuk berbagai sektor atau bidang, pemerintahan Soeharto – hingga Abdurrahman Wahid – selalu menerapkan konsep anggaran berimbang dinamis (*dynamic balance budget*), dimana jumlah pendapatan negara senantiasa sama dengan belanja negara – meskipun dalam realisasinya pendapatan dan pengeluaran tersebut tidak pernah seimbang secara utuh, bahkan pendapatan senantiasa lebih kecil dibandingkan pengeluaran (*deficit budget*) – dan jumlahnya diupayakan meningkat dari tahun ke tahun (Mangkoesebroto, 1994:86). Keseimbangan dan peningkatan antara pendapatan dan belanja tersebut dituangkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh Indonesia.

Akan tetapi, sejak tahun 2001, prinsip anggaran yang digunakan bergeser menjadi anggaran surplus/defisit (*surplus/deficit budget*). Kemudian, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, konsep pembiayaan pembangunan secara implisit menggunakan sistem anggaran terpadu (*unified budget*) karena harus mengacu pada praktik-praktik yang berlaku secara internasional (Abimanyu, 2004).

Sejalan dengan itu, format dan struktur APBN pun berubah dari *T-Account* menjadi *I-Account*. Format dan struktur *I-Account* yang berlaku saat ini terdiri atas tiga komponen, yakni pendapatan negara dan hibah, belanja negara, serta pembiayaan (lihat UU No. 36/2004).

Pendapatan negara dan hibah menampung seluruh pendapatan negara yang bersumber dari (1) penerimaan perpajakan, (2) penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan (3) hibah. Sedangkan belanja negara menampung seluruh pengeluaran negara, yang terdiri dari (1) belanja pemerintah pusat, yang meliputi pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan, dan (2) belanja untuk daerah, yang mencakup dana perimbangan serta dana otonomi khusus dan penyeimbang/penyesuaian. Selisih pendapatan negara dan hibah dengan belanja negara akan

berupa surplus/defisit anggaran. Jika terjadi defisit anggaran, maka diperlukan pembiayaan yang berasal dari luar pendapatan negara dan hibah, yang antara lain bersumber dari (1) pembiayaan dalam negeri, dan (2) pembiayaan luar negeri.

Dalam sistem *dual budgeting*, pengeluaran rutin dimaksudkan sebagai pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang dialokasikan untuk membiayai kegiatan rutin pemerintahan, yang terdiri dari (i) belanja pegawai, (ii) belanja barang, (iii) pembayaran bunga utang, (iv) subsidi, dan (v) pengeluaran rutin lainnya. Sementara itu, pengeluaran pembangunan merupakan pengeluaran negara yang dialokasikan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan yang dibebankan pada anggaran belanja pemerintah pusat dalam rangka pelaksanaan sasaran pembangunan nasional, baik berupa sasaran fisik maupun nonfisik. Dalam hal ini, pengeluaran pembangunan terdiri dari (i) pengeluaran pembangunan dalam bentuk pembiayaan rupiah, yang pendanaannya bersumber dari dalam negeri dan dari luar negeri dalam bentuk pinjaman program, dan (ii) pengeluaran pembangunan dalam bentuk pembiayaan proyek, yang pendanaannya bersumber dari luar negeri dalam bentuk pinjaman proyek.

Dalam sistem *unified budget*, tidak ada lagi pemisahan antara pengeluaran rutin dan pembangunan. Belanja negara menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja) dikelompokkan menjadi (i) belanja pegawai, (ii) belanja barang, (iii) belanja modal, (iv) pembayaran bunga utang, (v) subsidi, (vi) hibah, (vii) bantuan sosial, dan (viii) belanja lain-lain. Sedangkan belanja untuk daerah, sebagaimana yang berlaku selama ini terdiri dari (i) dana perimbangan, dan (ii) dana otonomi khusus dan penyesuaian.

3.2. Konsep Pembiayaan Pembangunan oleh Swasta

Sementara itu, untuk pembangunan di luar kemampuan pendanaan pemerintah pusat dan daerah, Indonesia menerapkan konsep pembiayaan pembangunan dalam bentuk investasi swasta, baik berupa penanaman modal dalam negeri (PMDN), penanaman modal asing (PMA), maupun bukan PMA/PMDN. Jenis investasi dalam pembangunan nasional dan daerah oleh dunia usaha dan masyarakat ini pada prinsipnya terdiri dari dua macam, yaitu investasi untuk pembangunan fisik dan investasi untuk pembangunan nonfisik.

Investasi merupakan faktor kunci dan prioritas bagi pengembangan kawasan perbatasan antarnegara. Karena itu, untuk menutupi

keterbatasan pembiayaan oleh pemerintah, maka pemerintah harus mampu memberikan stimulus-stimulus agar investor bersedia menanamkan modalnya di kawasan perbatasan antarnegara.

4. HASIL ESTIMASI KEBUTUHAN INVESTASI UNTUK PEMBANGUNAN DELAPAN PROVINSI DI KAWASAN PERBATASAN ANTARNEGARA

Berdasarkan formulasi dan asumsi yang telah dikemukakan sebelumnya, berikut ini dapat diuraikan hasil estimasi kebutuhan investasi untuk pembangunan kawasan perbatasan antarnegara di delapan provinsi.

4.1. Hasil Perhitungan Kapasitas Fiskal

Hasil perhitungan memperlihatkan bahwa kapasitas fiskal daerah-daerah di kawasan perbatasan antarnegara di delapan provinsi pada tahun 2003 lalu termasuk kategori rendah, yakni rata-rata Rp3.594.576. Untuk tingkat provinsi, kapasitas fiskal tertinggi diraih Kalimantan Timur (Rp15.055.253) dan terendah dialami Nusa Tenggara Timur (Rp1.044.278). Sedangkan untuk level kabupaten/kota kapasitas fiskal tertinggi dicapai Kabupaten Natuna (Rp97.416.647) dan terendah Kabupaten Kupang bersama Kabupaten Rote Ndao (Rp751.346). Hasil perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Tabel L1 dan Tabel L2 dalam Lampiran.

4.2. Hasil Proyeksi Tingkat Pertumbuhan Ekonomi

Sepanjang periode 2001-2003, tingkat pertumbuhan ekonomi di delapan provinsi dan 33 kabupaten/kota yang dijadikan daerah kajian memperlihatkan disparitas yang cukup mencolok. Ada tiga kabupaten dan satu provinsi yang mampu mencapai laju pertumbuhan ekonomi rata-rata dua digit setiap tahunnya, namun di sisi lain lebih banyak yang hanya sanggup mencetak satu digit (simak Tabel 1). Akibatnya, tingkat pertumbuhan ekonomi di delapan provinsi tersebut hanya rata-rata 4,37% per tahun.

Berdasarkan rata-rata angka pertumbuhan ekonomi di atas, dilakukan proyeksi untuk kurun waktu 2006-2009. Proyeksi dilaksanakan dalam dua skenario. Skenario pertama, tingkat pertumbuhan ekonomi untuk seluruh delapan provinsi hanya diproyeksikan rata-rata 4,37% per tahun, sesuai dengan kecenderungan prestasi selama 2001-2003. Dengan kapasitas fiskal yang termasuk kategori rendah, maka dalam skenario kedua laju pertumbuhan ekonomi di delapan

provinsi tersebut diproyeksikan rata-rata 5,46% setiap tahunnya. Hasil proyeksi selengkapnya untuk setiap kabupaten/kota dan provinsi di kawasan perbatasan antarnegara menurut skenario normal dan skenario akselerasi dapat ditelusuri kembali melalui Tabel 1.

4.3. Hasil Estimasi Kebutuhan Investasi

Dengan menggunakan formula (1) serta hasil perhitungan kapasitas fiskal dan hasil proyeksi tingkat pertumbuhan ekonomi, dapat diestimasi kebutuhan investasi untuk pembangunan kawasan perbatasan antarnegara di delapan provinsi, baik menurut skenario normal maupun skenario akselerasi. Hasilnya ditampilkan secara singkat pada Tabel 2.

Tabel 1. Proyeksi Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Rata-rata Kabupaten/Kota dan Provinsi di Kawasan Perbatasan Antarnegara, 2006-2009 (%)

Kawasan Perbatasan	Rata-rata Tingkat Pertumbuhan Ekonomi 2001-2003	Kapasitas Fiskal	Proyeksi Rata-rata Tingkat Pertumbuhan Ekonomi untuk 2006-2009	
			Skenario Normal	Skenario Akselerasi
Riau	4,79	Sedang	4,79	7,19
Bengkalis	4,71	Tinggi	4,71	8,24
Rokan Hilir	5,64	Sedang	5,64	8,47
Dumai	3,51	Sedang	3,51	5,26
Kepulauan Riau	5,27	Tinggi	5,27	9,22
Kepulauan Riau *	5,23	Sedang	5,23	7,85
Tanjung Pinang **	4,21	Sedang	4,21	6,31
Karimun	6,00	Tinggi	6,00	10,51
Natuna **	2,94	Tinggi	2,94	5,15
Batam	7,10	Tinggi	7,10	12,42
Kalimantan Barat	3,34	Rendah	3,34	4,18
Sambas	3,18	Rendah	3,18	3,97
Bengkayang	4,24	Rendah	4,24	5,30
Sanggau	3,56	Rendah	3,56	4,45
Sintang	3,09	Rendah	3,09	3,86
Kapuas Hulu	2,84	Sedang	2,84	4,26
Kalimantan Timur	12,57	Tinggi	12,57	22,00
Kutai Barat	11,32	Tinggi	11,32	19,80
Malinau	11,52	Tinggi	11,52	20,16
Nunukan	18,54	Tinggi	18,54	32,44
Sulawesi Utara	4,73	Rendah	4,73	5,91
Kepulauan Sangihe *	4,73	Rendah	4,73	5,91
Kepulauan Talaud ***	4,73	Rendah	4,73	5,91
Nusa Tenggara Timur	6,14	Rendah	6,14	7,68
Kupang *	7,01	Rendah	7,01	8,76
Rote Ndau ***	7,01	Rendah	7,01	8,76
Timor Tengah Utara	5,10	Rendah	5,10	6,37
Belu	5,65	Rendah	5,65	7,06
Alor	5,29	Rendah	5,29	6,61
Maluku	3,56	Rendah	3,56	4,45
Maluku Tenggara Barat	3,25	Rendah	3,25	4,06
Kepulauan Aru ***	3,83	Rendah	3,83	4,79

Kawasan Perbatasan	Rata-rata Tingkat Pertumbuhan Ekonomi 2001-2003	Kapasitas Fiskal	Proyeksi Rata-rata Tingkat Pertumbuhan Ekonomi untuk 2006-2009	
Papua **	4,86	Sedang	4,86	7,29
Jayapura	5,52	Rendah	5,52	6,89
Keerom ***	5,52	Sedang	5,52	8,28
Pegunungan Bintang ***	5,89	Rendah	5,89	7,36
Boven Digoel ***	5,39	Sedang	5,39	8,09
Merauke	5,39	Sedang	5,39	8,09
Mimika **	4,55	Sedang	4,55	6,83
Supiori ***	3,36	Rendah	3,36	5,88
Raja Ampat ***	3,92	Sedang	3,92	4,20
Total 8 Provinsi	4,37	Rendah	4,37	5,46

Sumber : BPS, diolah, Tabel L1, dan Tabel L2.

Catatan : * Rata-rata tingkat pertumbuhan ekonomi sebelum dimekarkan

** Rata-rata tingkat pertumbuhan ekonomi 2002-2003

*** Menggunakan rata-rata tingkat pertumbuhan ekonomi kabupaten induknya

Tabel 2. Proyeksi Kebutuhan Investasi Kumulatif di Delapan Provinsi Kawasan Perbatasan Antarnegara, 2006-2009 (Rp Juta)

Kawasan Perbatasan	ICOR	Skenario Normal	Skenario Akselerasi
Riau	4,50	10.778.723	17.135.957
Bengkalis	4,00	5.815.754	11.086.229
Rokan Hilir	4,50	3.373.281	5.416.796
Dumai	4,50	927.745	1.452.637
Kepulauan Riau	4,00	6.154.944	11.848.720
Kepulauan Riau	4,50	501.786	801.868
Tanjung Pinang	4,50	423.356	668.444
Karimun	4,00	535.486	1.044.103
Natuna	4,00	538.477	994.652
Batam	4,00	5.375.291	10.679.581
Kalimantan Barat	5,00	2.202.961	2.810.755
Sambas	5,00	523.689	667.505
Bengkayang	5,00	263.698	338.271
Sanggau	5,00	813.893	1.039.800
Sintang	5,00	402.606	512.891
Kapuas Hulu	4,50	187.108	290.630
Kalimantan Timur	4,00	4.944.692	10.749.309
Kutai Barat	4,00	2.694.556	5.741.206
Malinau	4,00	702.771	1.502.284
Nunukan	4,00	1.858.440	4.425.500
Sulawesi Utara	5,00	429.806	552.950
Kepulauan Sangihe	5,00	318.342	409.553
Kepulauan Talaud	5,00	111.550	143.512
Nusa Tenggara Timur	5,00	1.523.488	1.976.371
Kupang	5,00	642.684	837.939
Rote Ndao	5,00	227.720	296.904
Timor Tengah Utara	5,00	194.330	250.553
Belu	5,00	291.869	377.539
Alor	5,00	181.760	234.609

Maluku	5,00	298.613	381.498
Maluku Tenggara Barat	5,00	122.005	155.577
Kepulauan Aru	5,00	177.509	227.146
Papua	4,50	7.084.576	11.272.248
Jayapura	5,00	852.982	1.102.476
Keerom	4,50	83.454	133.816
Pegunungan Bintang	5,00	61.416	79.555
Boven Digoel	4,50	113.398	181.552
Merauke	4,50	372.508	596.394
Mimika	4,50	5.070.007	8.037.429
Raja Ampat	4,50	87.690	137.980
Supiori	4,50	182.322	232.648
Total 8 Provinsi	5,00	29.611.812	38.014.736

Sumber : Hasil Estimasi.

Tabel 2 mengindikasikan bahwa untuk membangun kawasan perbatasan antarnegara di delapan provinsi dibutuhkan biaya investasi sekitar Rp29,6 triliun hingga Rp38,0 triliun untuk jangka waktu 2006-2009. Sebagian besar biaya investasi tersebut dibutuhkan oleh tiga provinsi, yakni Riau, Papua, dan Kepulauan Riau. Sedangkan tiga kabupaten/kota yang paling banyak membutuhkan investasi adalah Kota Batam, Kabupaten Bengkalis, dan Kabupaten Mimika. Untuk mempercepat pembangunan dan sekaligus mempertahankan tingkat pertumbuhan yang telah dicapai selama ini, ketiga kabupaten/kota maupun ketiga provinsi tadi memang membutuhkan biaya investasi dalam jumlah yang cukup besar.

5. KESIMPULAN

Untuk memenuhi kebutuhan investasi di delapan provinsi sebagaimana telah dikemukakan di atas, berikut ini dapat diidentifikasi beberapa alternatif sumber pembiayaan yang dapat dimanfaatkan

dalam rangka pembangunan kawasan perbatasan antarnegara.

1. Pembiayaan oleh Pemerintah :
 - a. Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi (kementerian dan lembaga negara).
 - b. Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi.
 - c. Belanja Pemerintah Daerah Menurut Organisasi (SKPD).
 - d. Belanja Pemerintah Daerah Menurut Fungsi.
 - e. Dana Alokasi Khusus (DAK).
 - f. Pinjaman Pemerintah yang diteruskan kepada Pemerintah Daerah.
2. Pembiayaan oleh Swasta dan BUMN :
 - a. Investasi domestik (kredit perbankan dan nonperbankan).
 - b. Investasi asing, terutama dari negara tetangga.
 - c. Investasi masyarakat (non-PMDN/PMA).
 - d. Kewajiban Obligasi Publik dan Kewajiban Obligasi Universal (PSO dan USO).

DAFTAR PUSTAKA

- Abimanyu, Anggito, 2004, "Format Anggaran Terpadu Menghilangkan Tumpang Tindih," *Makalah*, Jakarta.
- Alkadri, 2003, "Strategi Pengembangan Investasi dan Promosi," dalam Alkadri dan Hamid (Penyunting), *Model dan Strategi Pengembangan Kawasan Perbatasan Kabupaten Nunukan*, Pusat Pengkajian Kebijakan Teknologi Pengembangan Wilayah, Jakarta, hlm. 278.
- Alkadri, 2005, "Strategi Pengembangan Kawasan Perdesaan di Perbatasan Antarnegara : Studi Kasus Kawasan Perdesaan di Kecamatan Tasifeto Timur di Perbatasan Kabupaten Belu – Timor Leste," *Jurnal Sains dan Teknologi Indonesia*, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Volume 7, No. 3, Desember.
- Alkadri dan Hamid (Penyunting), 2003, *Model dan Strategi Pengembangan Kawasan Perbatasan Kabupaten Nunukan*, Pusat Pengkajian Kebijakan Teknologi Pengembangan Wilayah, Jakarta.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2005, *Draft Rancangan Peraturan Presiden*

Republik Indonesia tentang Badan Pengelolaan Perbatasan Antarnegara, Jakarta, 11 Juni.

- Biro Pusat Statistik, berbagai daerah kajian, berbagai tahun.
- Dewi dkk., Isnaeni Setya (Penyusun), 2005, *Rencana Induk Pengembangan Wilayah Perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Direktorat Wilayah Administrasi dan Perbatasan, Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum, Departemen Dalam Negeri, Jakarta, hlm. 15-31.
- Hamid dkk. (Penyusun), 2001, *Kawasan Perbatasan Kalimantan : Permasalahan dan Konsep Pengembangan*, Pusat Pengkajian Kebijakan Teknologi Pengembangan Wilayah, Jakarta.
- Irwan dkk., Lella N.Q., 1997, "Analisis Perubahan Struktur Ekonomi Indonesia Selama PJP I," dalam Didik Susetyo, dkk., *Kinerja Ekonomi Indonesia Selama PJP I : Sebuah Refleksi Memasuki Abad XXI*, Penerbit Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung, hlm. 19-38.
- Jusnadi dkk., Achmad, 2005, *Platform Penanganan Permasalahan Perbatasan Antarnegara*, Cetakan Ke-2, Direktorat Wilayah Administrasi dan Perbatasan, Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum, Departemen Dalam Negeri, Jakarta.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, 2005, *Rencana Aksi Pengelolaan Perbatasan Antarnegara Tahun Anggaran 2006*, Jakarta, Juni.
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 538/KMK.07/2003 tentang Peta Kapasitas Fiskal Dalam Rangka Penerusan Pinjaman Luar Negeri Pemerintah Kepada Daerah Dalam Bentuk Hibah.
- Lucas Jr., Robert. E., 1988, "On the Mechanics of Economic Development," *Journal of Monetary Economics*, Vol. 22. Mangkoesobroto, Guritno, 1994, *Kebijakan Ekonomi Publik di Indonesia : Substansi dan Urgensi*, PT Gramedia, Jakarta, hlm. 86.
- Pemerintah Kabupaten Raja Ampat, 2004, *Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Raja Ampat 2005-2014*, Waisai.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar, Jakarta, 29 Desember 2005.

- Romer, Paul M., 1990, "Endogeneous Technological Change," *Journal of Political Economy*, Vol. 98, hlm. 71-102.
- Rosenberg, Nathan, Ralph Landau, and David C. Mowery (Eds.), 1972, *Technology and the Wealth of Nations*, Stanford University Press.
- Sekretariat Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional, Direktorat Jenderal Penataan Ruang, Departemen Pekerjaan Umum, 2005, *Rancangan Peraturan Presiden RI tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara* (di beberapa provinsi), Jakarta.
- Trihadiwati, Endang dan Alkadri, 2000, "Analisis Pertumbuhan dan Perubahan Struktur Ekonomi Kabupaten Selayar : Periode 1987-1998," *Jurnal Sains dan Teknologi Indonesia*, Vol. 2, No. 4, Juli, hlm. 32.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005.
- Widodo, Hg. Suseno Triyanto, 1990, *Indikator Ekonomi*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.

